

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN BERBASIS LITERASI MEMBACA PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DI SMA WACHID HASYIM 2 TAMAN SIDOARJO

Hanadya Sekaryati

(Universitas Negeri Surabaya), hsekaryati@gmail.com

Harmanto

(Universitas Negeri Surabaya), harmanto@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penilaian berbasis literasi membaca pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus karena adanya Kebijakan dari sekolah mengenai penilaian berbasis literasi pada semua mata pelajaran khususnya yang mengarah pada bentuk soal-soal Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berawal dari Kepala Sekolah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada semua Bapak/Ibu guru mata pelajaran untuk memasukkan soal-soal Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dalam penilaian sumatif. Kemudian, Kepala Sekolah menunjuk Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan. Dalam menyampaikan kebijakan kepada Bapak/Ibu guru, Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum bekerjasama dengan Tim Pengembang Kurikulum sekolah dalam melakukan *workshop* bagi Bapak/Ibu guru, memberikan pengarahan dan menjadi korektor soal yang dibuat oleh Bapak/Ibu guru. Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo dalam melaksanakan kebijakan mengembangkan soal dari tiga aspek yaitu konten, proses kognitif dan konteks. Konten yang diterapkan berupa teks informasi/teks artikel sebagai stimulus, dari teks tersebut kemudian mengarahkan peserta didik untuk dapat menemukan informasi dalam teks, mengolah apa yang sudah dibaca dan mengaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Sementara konteks yang diberikan dapat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, kejadian terkini atau hanya mengenai materi pembelajaran saja. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran tanggung jawab dalam variabel struktur birokrasi berjalan baik.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kebijakan, Literasi Membaca

Abstract

This study aims to describe the implementation of reading literacy-based assessment policies in Pancasila Education subjects at Wachid Hasyim 2 High School Taman Sidoarjo. The research method used is a qualitative approach with a case study research design because of the school's policy regarding literacy-based assessment in all subjects, especially those that lead to the form of AKM questions. Data was collected through documentation, interviews and observations. Data analysis techniques with the Miles and Huberman model. The results of the study show that the implementation of the policy begins with the Principal issuing a Decree (SK) to all subject teachers to include AKM questions in summative assessment. Then, the Principal appointed the Deputy Principal of the Curriculum section as the coordinator of policy implementation. In conveying policies to teachers, the Vice Principal of the Curriculum Division collaborates with the school Curriculum Development Team in conducting workshops for teachers, providing briefings and becoming proofreaders of questions made by teachers. Teachers of Pancasila Education subjects themselves in implementing the policy develop questions from three aspects, namely content, cognitive processes and context. The content applied in the form of informational text/article text as a stimulus, from the text then directs students to be able to find information in the text, process what has been read and associate it with the knowledge they have. Meanwhile, the context provided can be related to the daily life of students, current events or only about learning materials. This shows that the distribution of responsibilities in the variables of the bureaucratic structure is going well.

Keywords: Implementation, Policy, Reading Literacy

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi kebutuhan manusia dari ketidakberdayaan menjalani hidup menuju manusia yang berguna. Pendidikan juga memberi peran penting untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas serta mampu berkontribusi bagi bangsa Indonesia menuju bangsa yang

bermartabat. Dalam dunia pendidikan, Pemerintah membuat Ujian Nasional yang sering disingkat dengan UN sebagai bentuk evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang unggul dalam berbagai bidang, membentuk peserta didik yang berkarakter berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (Mukhlisshoh & Bakar, 2021). Mulai pada tahun

2021, Ujian Nasional (UN) resmi digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Kebijakan dihapuskannya UN ini digantikan oleh Asesmen Nasional (AN) yang memiliki tiga instrumen dalam pelaksanaannya yaitu AKM, survei lingkungan belajar serta survei karakter (Fajriyanti, 2023). Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah penilaian keterampilan dasar siswa yang diperlukan bagi mereka untuk tumbuh sebagai manusia dan dapat berkontribusi pada masyarakat. Dalam hal ini, ada dua kompetensi mendasar yang diukur dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), yaitu literasi membaca dan literasi numerasi (Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud, 2020).

Karakteristik dari AKM ini dengan mengembangkan soal dari tiga aspek, yaitu aspek karakteristik (konten), keluasan (proses kognitif), dan kedalaman (konteks) materi pembelajaran (Deviana & Aini, 2022:1287). Dalam hal aspek konten, memuat tentang teks yang digunakan dan dalam hal proses kognitif meliputi kemampuan dalam menemukan informasi, menginterpretasi informasi, mengevaluasi dan merefleksi informasi. Kemampuan dalam menemukan informasi bermaksud bahwa peserta didik dapat mengidentifikasi, menemukan, dan mendeskripsikan informasi eksplisit dari teks yang diberikan. Level kognitif selanjutnya adalah kemampuan memahami teks, yakni dengan melakukan interpretasi dan mengintegrasikan. pada tahap ini, peserta didik mampu mengolah apa yang telah dibaca dari teks yang diberikan sehingga timbul sebuah pemahaman dalam dirinya. Sementara pada level mengevaluasi dan merefleksi informasi, peserta didik dalam hal ini dapat mengaitkan ide, sikap, pengetahuan yang dimilikinya untuk dapat memberi penilaian pada teks atau membuat refleksi terhadapnya (Sani, 2021:5).

Literasi dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki individu untuk memaknai informasi secara kritis dengan mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kualitas hidupnya (Vijayantera, 2020:93). Survey dari *Program for International Student Assessment* (PISA) yang dilakukan pada tahun 2018 berdasarkan informasi dari Kemendikbud menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca meraih skor rata-rata yakni 371 dibandingkan dengan rata-rata skor OECD yakni 487. Lebih lanjut, hasil studi dari *Program for International Student Assessment* (PISA) yang dilakukan pada tahun 2022 berdasarkan informasi dari Kemendikbud, menunjukkan bahwa Indonesia naik tingkat posisi berada pada 5 sampai 6 posisi dibanding dengan PISA 2018, akan tetapi skor yang diperoleh yakni 359 dibanding dengan hasil PISA pada tahun 2018 lalu yang turun hingga 12 poin. Berdasarkan hasil survey PISA di atas, menunjukkan bahwa skor siswa Indonesia dalam

hal membaca (literasi) masih rendah dibanding dengan rata-rata skor OECD. AKM sebagai kebijakan baru pengganti Ujian Nasional dapat menjadi solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, berdasarkan skor perolehan PISA sebagai indikator mutu pendidikan sebuah negara. Hal tersebut karena AKM tidak menilai dari kelulusan siswa, akan tetapi mengukur kemampuannya dalam menyongsong abad 21 untuk dapat bersaing dengan dunia internasional yaitu dalam hal literasi membaca atau literasi numerasi yang menjadi indikator penentu mutu pendidikan (Aisah *et al.*, 2021).

Berdasarkan hasil studi PISA dan karakteristik AKM yang telah dipaparkan di atas, maka perlu adanya pengembangan literasi kepada peserta didik pada zaman kini, sebab kemampuan literasi yang bagus dapat menjadi pendukung kemampuan kritis yang dimiliki siswa dalam menganalisis persoalan yang dihadapi dan kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan dalam hal membaca, menulis hingga berlanjut pada memahami informasi secara kritis serta tanggap dalam memecahkan masalah (Ramdhayani, 2023:71). Selain itu, Pada satuan pendidikan dengan dilaksanakannya Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) pemerintah mengukur kemampuan peserta didik dalam Literasi baca tulis dan literasi numerasi. Literasi baca tulis diukur dengan memberikan peserta didik gambar, diagram disertai teks panjang, kemudian diminta untuk menjawab soal berdasarkan kemampuan analisis peserta didik terhadap data yang diberikan. Sedangkan literasi numerasi diberikan dalam bentuk soal dilengkapi gambar, diagram disertai teks panjang yang berisi angka-angka, kemudian siswa diminta untuk menjawab soal dengan menganalisis angka-angka yang tersedia pada data soal (Taufik *et al.*, 2023). SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo merupakan salah satu sekolah yang mengimplementasikan kebijakan mengenai pembiasaan soal-soal Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dengan menerapkan adanya penilaian berbasis literasi kepada peserta didik untuk mempersiapkan kemampuan literasinya saat menghadapi AKM

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan dalam surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan merdeka belajar bahwa sudah sepantasnya setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, dan SMA, menerapkan kurikulum merdeka belajar. Akibatnya, kurikulum merdeka yang diterapkan di setiap sekolah sekarang menempatkan keterampilan literasi dan numerasi sebagai hal yang penting dalam prestasi sekolah (Hutabarat *et al.*, 2022:59). Karakteristik utama dari kurikulum merdeka tersebut mencakup adanya pembelajaran berbasis proyek sesuai profil pelajar Pancasila, fokus pada materi

substansial dalam hal kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik (Wiguna *et al*, 2022:24)

Berdasarkan pernyataan di atas, pengembangan literasi dapat dilakukan dengan menerapkan penilaian berbasis literasi dalam pembelajaran di sekolah. Penilaian berbasis literasi adalah instrumen penilaian yang diujikan kepada peserta didik dalam aspek kognitif (pengetahuan) yang mengacu pada bentuk soal Asesmen Nasional dengan berbasis literasi. Berbasis literasi yang dimaksudkan dalam penilaian tersebut adalah dengan adanya teks informasi sebagai konten yang diujikan kepada peserta didik, kemudian dari teks informasi tersebut mengarahkan peserta didik untuk dapat menemukan, memahami, mengevaluasi dan merefleksi dari teks informasi yang diberikan sebagai proses kognitif peserta didik, serta dari aspek konteks atau kedalaman materi adalah bahan literasi yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penilaian berbasis literasi merupakan bagian dari AKM dan yang digunakan adalah literasi membaca.

Penilaian berbasis literasi tersebut penting diterapkan sebab pengetahuan pendidik terhadap konsep literasi, pengembangan dan implementasinya masih menjadi tantangan kini, ditambah dengan munculnya AKM belum dibiasakan hadir dalam proses penilaian (Hartati, 2021:2). AKM merupakan penilaian dalam hal kemampuan mendasar peserta didik untuk dapat mampu mengembangkan kapasitas dirinya serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Kompetensi mendasar yang dinilai dalam AKM adalah literasi membaca dan numerasi (Putri *et al.*, 2022). Dengan adanya penilaian berbasis literasi, peserta didik dapat meningkatkan kecakapan literasinya, menstimulasi peserta didik dalam berpikir kritis serta memecahkan permasalahan dengan beragam konteks (Wijaya *et al*, 2021:1).

Berdasarkan atas hasil studi pendahuluan, SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo merupakan salah satu sekolah yang telah menerapkan Penilaian Berbasis Literasi. Penerapan penilaian berbasis literasi ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan dari sekolah mengenai acuan pembuatan soal yang diujikan dalam penilaian sumatif tengah semester dan akhir semester di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo untuk menerapkan penilaian kognitif (pengetahuan) dengan berbasis literasi dan numerasi khususnya yang mengacu pada pembiasaan soal-soal bentuk AKM. Data tersebut diperoleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum di SMA Wachid Hasyim 2 Taman yang memaparkan bahwa adanya Surat Keputusan (SK) kepada Bapak/Ibu guru semua mata pelajaran untuk menyusun soal-soal seperti AKM dengan

berbasis literasi atau numerasi kepada peserta didik pada saat pelaksanaan penilaian (sumatif).

Kebijakan tersebut telah dilakukan sejak Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021 telah berganti menjadi AKM sebagai upaya dalam mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi ujian AKM. Berawal dari latar belakang tersebut, kemudian kepala sekolah SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo mengeluarkan kebijakan terkait pembiasaan soal AKM yang berbasis literasi dan numerasi pada semua mata pelajaran, termasuk Pendidikan Pancasila agar peserta didik memiliki kemampuan literasi yang baik dan mampu menghadapi ujian AKM. Dari kebijakan tersebut kemudian disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo kepada Tim Pengembang Sekolah (TPS). Dalam hal ini, Tim Pengembang Sekolah yang diberi tanggung jawab untuk memberikan sosialisasi kepada Bapak/Ibu Guru SMA Wachid Hasyim 2 Taman terkait bagaimana pembuatan soal penilaian berbasis literasi dan numerasi seperti AKM untuk diterapkan kepada peserta didik.

Dengan adanya kebijakan dari SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo tersebut, semua guru menerapkannya sesuai dengan bidang masing-masing yang dikuasai oleh guru mata pelajaran. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila sendiri menerapkan penilaian tersebut dengan berbasis literasi membaca. Literasi membaca adalah kemampuan siswa dalam hal memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi berbagai jenis teks tertulis sebagai pengembangan kompetensi dirinya sebagai warga negara Indonesia maupun warga dunia serta berkontribusi kepada masyarakat (Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud, 2020:3). Literasi membaca diberikan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila kepada peserta didik pada saat pelaksanaan penilaian berlangsung yang dibuat oleh guru dengan menyesuaikan pada pokok materi atau capaian pembelajaran yang sedang berlangsung pada periode pembelajaran di SMA Wachid Hasyim 2 Taman. Dengan demikian, adanya penilaian berbasis literasi ini dapat mendukung kemampuan literasi peserta didik dalam memahami soal dengan baik, berpikir kritis, serta terbiasa dalam menyelesaikan masalah (Familiyana *et al.*, 2022:80).

Selain itu, dalam AKM memiliki variasi soal dalam penerapannya (Deviana & Aini, 2022:1290). Begitupun juga dengan penerapan penilaian berbasis literasi membaca dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Wachid Hasyim 2 Taman menggunakan bervariasi bentuk soal mulai dari pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, benar-salah dan uraian singkat. Dengan demikian, Pengembangan soal dalam penerapan penilaian berbasis literasi tersebut mengacu pada AKM

yang memiliki soal-soal bervariasi, menghasilkan soal yang kontekstual hingga menstimulus peserta didik untuk berpikir kritis (Deviana & Aini, 2022:1289). Oleh karena itu, penilaian berbasis literasi membaca yang diterapkan merupakan bagian dari implementasi AKM.

Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 54% responden menyadari perlunya menerapkan Asesmen Nasional dan signifikansinya. Mengenai format pertanyaan, 48% responden memberikan jawaban yang akurat dan tepat. Namun, hanya 28% yang memilih respon yang tepat dan sesuai yang memiliki kesadaran akan instrumen AKM yang digunakan untuk menilai kemampuan kognitif peserta didik (Novita et al., 2021). Selain itu, studi menurut (Rokhim et al., 2021) mengungkapkan bahwa 12 responden belum mempersiapkan AKM, sedangkan 32 responden sudah, dan 15 responden salah menjawab dan 29 responden benar mengenai kemampuan untuk diukur dalam AKM. Sementara dalam hal seberapa baik siswa mempelajari Pancasila, literasi memiliki pengaruh positif dan signifikan. Kompetensi kecerdasan kewarganegaraan siswa sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan budaya membaca. Pemanfaatan kegiatan literasi di sekolah dapat memberikan hasil yang optimal untuk pengajaran Pendidikan Pancasila. Seseorang yang memiliki rasa bangga dan kualifikasi dan kecerdasan bangsa yang kuat akan dihasilkan dari kegiatan literasi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila (Fayza et al., 2021).

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa masih ada beberapa guru yang belum memahami dengan baik tentang Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Padahal, guru memiliki peran penting dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) sebab guru menjadi pilar pendidikan untuk memegang peran dan tanggung jawab besar atas keberhasilan pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Oleh sebab itu guru perlu memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai tentang konsep maupun implementasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) (Fauziah et al., 2021). Oleh karena itu, peneliti disini tertarik untuk melakukan penelitian implementasi kebijakan penilaian berbasis literasi membaca pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut, pihak-pihak yang terlibat, persiapan guru dalam menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), pengetahuan guru terkait komponen-komponen apa saja dalam literasi membaca dan penerapan soal berbasis literasi membaca yang digunakan oleh guru dalam rangka pembiasaan soal-soal AKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian studi kasus karena dengan adanya Kebijakan dari Kemendikbud mengenai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang kemudian diimplementasikan oleh SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo dengan dibuktikan adanya Surat Keputusan (SK) mengenai pembuatan penilaian berbasis literasi dan numerasi pada semua mata pelajaran khususnya yang mengarah pada bentuk soal-soal AKM, tak terkecuali juga pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Pertimbangan yang digunakan oleh peneliti dalam pemilihan informan yang diperkirakan paling paham mengenai data atau keterangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti berdasarkan permasalahan yang diangkat antara lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, koordinator tim pengembang kurikulum dan guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila.

Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan penilaian berbasis literasi membaca pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo. Implementasi dalam hal ini untuk mengungkap pelaksanaan kebijakan penilaian berbasis literasi di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo. Pemilihan lokasi penelitian di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo karena sebagai sekolah yang memiliki kebijakan dalam pembuatan soal yang mengarah pada AKM. Waktu pelaksanaan penelitian berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan mulai persiapan hingga penyusunan laporan selama tujuh bulan. Waktu tujuh bulan terhitung sejak bulan Desember hingga bulan Juli.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi untuk memperoleh jenis data yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur dimana satu set pertanyaan diberikan oleh peneliti secara berurutan yang kemudian jawabannya akan direkam dalam bentuk yang terstandarisasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung serta menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian dari adanya implementasi kebijakan penilaian berbasis literasi membaca pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung serta menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian antara lain Surat Keputusan (SK) kebijakan mengenai pelaksanaan pembuatan penilaian berbasis literasi dan

numerasi dalam rangka pembiasaan soal-soal AKM, Instrumen penilaian berbasis literasi membaca yang digunakan untuk diujikan kepada peserta didik dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila., Hasil penilaian berbasis literasi membaca oleh peserta didik. dan Hasil nilai AKM oleh peserta didik.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, display data, dan conclusions. Reduksi data diawali oleh peneliti dengan memilah data-data yang pokok dan penting dengan tujuan agar data dalam penelitian menjadi terarah, display data disajikan dalam bentuk narasi yang berupa deskripsi dengan disertai tabel dan gambar untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud penelitian dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menemukan makna dari data yang telah disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi suatu kebijakan tidak akan dimulai sebelum maksud dan tujuan ditentukan sebelumnya atau ditetapkan oleh keputusan kebijakan, tidak ada kebijakan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, implementasi adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh berbagai pihak untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan pada akhirnya menghasilkan hasil yang konsisten dengan tujuan atau sasaran kebijakan.

Sejak tahun 2021, Ujian Nasional (UN) telah berganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Secara nasional, kini semua sekolah peserta didiknya akan menghadapi ujian AKM. Ada 2 kompetensi mendasar yang diujikan dalam AKM yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Bentuk soal yang diujikan juga bervariasi, mulai dari pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, benar-salah, menjodohkan dan uraian. Berawal dari hal ini, SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo kemudian mengeluarkan kebijakan mengenai penilaian berbasis literasi yang berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah bertujuan untuk mengenalkan gambaran dan bentuk-bentuk soal AKM kepada peserta didik SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo sehingga dapat membantu peserta didik untuk terbiasa menelaah soal-soal berbasis literasi dan numerasi seperti dalam AKM.

Penilaian berbasis literasi dalam kebijakan ini adalah instrumen penilaian yang diujikan kepada peserta didik dalam aspek kognitif (pengetahuan) yang mengacu pada bentuk soal Asesmen Nasional dengan berbasis literasi. Berbasis literasi yang dimaksudkan dalam penilaian tersebut adalah dengan adanya teks informasi sebagai konten yang diujikan kepada peserta didik, kemudian dari teks informasi tersebut mengarahkan peserta didik untuk dapat menemukan, memahami, mengevaluasi dan

merefleksi dari teks informasi yang diberikan sebagai proses kognitif peserta didik, serta dari aspek konteks atau kedalaman materi adalah bahan literasi yang diberikan oleh guru kepada peserta didik.

Implementasi Kebijakan Penilaian berbasis Literasi Membaca Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo ini dianalisis dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan George C. Edward III (dalam Tangkilisan, 2003) yang menyatakan terdapat empat faktor atau indikator yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Dalam melaksanakan kebijakan penilaian berbasis literasi di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo, diperlukan adanya aktor-aktor atau pihak-pihak yang terlibat guna mendukung keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai alur penyampaian komunikasi kebijakan yang baik mulai dari pimpinan hingga ke Bapak/Ibu guru mata pelajaran bidang studi. Oleh karena itu, Kepala Sekolah sebagai pembuat kebijakan menunjuk actor-actor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu mulai dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Tim Pengembang Kurikulum/Tim Pengembang Sekolah, Bapak/Ibu Guru Mata Pelajaran Bidang Studi dan Tim IT bila diperlukan.

Langkah awal komunikasi untuk melaksanakan kebijakan penilaian berbasis literasi seperti AKM adalah dimulai dari Kepala Sekolah yang membuat kebijakan dan mengeluarkan Surat Keputusan terkait kebijakan tersebut. Dalam Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa menugasi sepenuhnya kepada Bapak/Ibu Guru SMA Wachid Hasyim 2 Taman sebagai penyusun naskah soal sumatif kelas X, XI dan XIII dengan mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang salah satunya adalah mengenai memasukkan soal AKM 25% – 50% dari jumlah soal.

Lalu kemudian Kepala Sekolah menyerahkan tanggungjawab kepada Wakilnya yaitu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum sebagai koordinator dari pelaksanaan kebijakan. Setelah menerima tugas atau komunikasi dari Kepala Sekolah untuk mengkoordinir pelaksanaan penilaian berbasis literasi, kemudian Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum berkomunikasi dengan Tim Pengembang Kurikulum untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada Bapak/Ibu Guru mata pelajaran bidang studi sekaligus membantu memberikan pengarahan, mengadakan pelatihan, memberi contoh dan melaksanakan evaluasi kepada Bapak/Ibu guru mengenai bagaimana membuat soal-soal yang berbasis literasi dalam melaksanakan kebijakan penilaian berbasis literasi. Hal ini

berdasarkan pernyataan dari Ibu Dra. Hj. Nur Djannah yang menyatakan bahwa.

“Untuk melaksanakan kebijakan penilaian berbasis literasi atau numerasi seperti yang AKM itu tadi, langkah pertama saya selaku Kepala Sekolah membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penyusunan soal kepada Bapak/Ibu Guru agar menerapkan soal-soal berbasis literasi membaca atau literasi numerasi yang seperti AKM dan disesuaikan pada mata pelajaran masing-masing. Dalam Surat Keputusan tersebut juga ada kriterianya bagaimana pembuatan soal tersebut. Lalu kemudian saya menyerahkan tanggungjawab pelaksanaan kebijakan ini kepada wakil saya yaitu Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum sebagai koordinator pelaksana. Dari Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum tadi, kemudian turun ke Tim Pengembang Kurikulum/Tim Pengembang Sekolah. Jadi di sekolah kami juga punya Tim Pengembang Kurikulum/Tim Pengembang Sekolah. Setelah dari Tim Pengembang tadi baru dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada Bapak/Ibu Guru Mata Pelajaran bidang studi. Dan tidak lupa juga ada tim IT apabila dibutuhkan dalam pembuatan soal atau untuk melaksanakan penilaian secara online” (Wawancara 12 Juni 2024).

Sumberdaya

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Dalam melaksanakan kebijakan, Kepala Sekolah dalam hal ini dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum sebagai koordinator pelaksanaan penilaian berbasis literasi. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai koordinator, Wakil Kepala Sekolah berkoordinasi dengan Tim Pengembang Kurikulum sekolah untuk menyampaikan kebijakan dari Kepala Sekolah kepada Bapak/Ibu guru mata pelajaran bidang studi. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Ibu Dra. Hj. Muamaroh, M.Pd yang menyatakan seperti berikut.

“Jadi disini saya berkomunikasi dengan Tim Pengembang Kurikulum. Bahwasannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah mengharuskan kepada Bapak/Ibu guru di dalam pelaksanaan penilaian sumatif tengah semester dan penilaian sumatif akhir semester, semua Bapak/Ibu guru mata pelajaran bidang studi wajib menerapkan soal-soal dengan berbasis literasi membaca atau literasi numerasi seperti yang ada dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) pun juga bentuk-bentuk soalnya yang mulai dari pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, benar-salah, menjodohkan dan uraian singkat. Nah di sini saya meminta bantuan kepada Tim Pengembang Kurikulum di lapangan untuk dapat mensosialisasikan hal tersebut kepada Bapak/Ibu Guru mata pelajaran bidang studi sekaligus membantu memberikan pengarahan, mengadakan pelatihan, memberi contoh dan melaksanakan evaluasi kepada Bapak/Ibu guru

bagaimana sih itu membuat soal-soal yang berbasis literasi membaca atau literasi numerasi” (Wawancara 13 Juni 2024)

Selain itu, Tim Pengembang Kurikulum, dalam hal ini dibutuhkan dalam membantu Bapak/Ibu guru mata pelajaran bidang studi dalam melaksanakan kebijakan dari sekolah. Tim Pengembang Kurikulum dalam melaksanakan kebijakan penilaian berbasis literasi ini memperoleh tanggungjawab dalam hal sosialisasi kepada Bapak/Ibu guru mata pelajaran bidang studi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suparmi, S.Pd selaku koordinator Tim Pengembang Kurikulum menyatakan bahwa.

“Jadi bentuk sosialisasi yang kami lakukan yaitu kami pernah memberi wadah kepada Bapak/Ibu guru mata pelajaran bidang studi berupa Workshop/Pelatihan. Narasumbernya pun yang diundang bisa dari MGMP atau memang dari narasumber yang ahli kompeten dalam pembuatan soal berbasis AKM. Dengan harapan tujuannya adalah supaya Bapak/Ibu guru ini mampu membuat soal berbasis AKM seperti adanya konten yang berupa bacaan, tabel, gambar sebagai bahan stimulus kepada peserta didik. Itu yang penting sebagai bahan literasi untuk peserta didik sendiri itu kan. Sehingga diharapkan dengan mengikuti pelatihan ini Bapak/Ibu guru itu mempunyai gambaran bagaimana membuat soal yang berbasis literasi seperti yang ada pada AKM dan tentunya dikembalikan lagi ya sesuai dengan mata pelajaran yang dikuasai apakah menggunakan literasi membaca atau literasi numerasi” (Wawancara 14 Juni 2024).

Dari keterangan informan tersebut, Tim Pengembang Kurikulum pernah melakukan sosialisasi dalam bentuk *Workshop* kepada Bapak/Ibu guru mata pelajaran bidang studi supaya Bapak/Ibu guru ini memperoleh bekal dalam melaksanakan kebijakan dari Kepala Sekolah. *Workshop* yang dilakukan membahas mengenai AKM seperti bagaimana bentuk variasi soalnya dan komponen soal AKM nya seperti adanya stimulus berupa teks, gambar, tabel dan lain-lain. Dengan adanya *Workshop* tersebut utamanya bertujuan agar Bapak/Ibu guru mengenali adanya seperti konten, proses kognitif dan konteks yang digunakan dalam soal berbasis literasi. Selain memberi wadah *workshop* kepada Bapak/Ibu guru mata pelajaran bidang studi, Tim Pengembang Kurikulum juga memberi contoh bagaimana itu bentuk-bentuk soal seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) kepada Bapak/Ibu guru mata pelajaran bidang studi. Hal tersebut berdasarkan hasil pernyataan Ibu Suparmi, S.Pd yang menyatakan bahwa,

“Selain mengarahkan Bapak/Ibu guru mata pelajaran bidang studi untuk mengikuti pelatihan/workshop terkait bagaimana membuat soal-soal berbasis literasi tadi. Kami di sini dari Tim Pengembang Kurikulum juga memberi atau membuat contoh bagaimana soal-

soalnya seperti yang ada bacaannya, tabel, gambar atau bahkan infografis dan bentuk-bentuk soal mulai dari pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, benar-salah, menjodohkan, uraian. Kami kenalkan kepada Bapak/Ibu guru itu. Jadi disini Tim Pengembang Kurikulum sebagai area diskusi atau istilahnya MGMP bagi Bapak/Ibu guru itu. Kemudian, karena di sini kami Tim Pengembang Kurikulum sebagai koordinator korektor soal berbasis literasi dan numerasi tadi, kami juga terkadang memberi evaluasi kepada Bapak/Ibu guru apabila terdapat beberapa soal yang salah atau kurang memenuhi standar seperti AKM tadi. Kami beri himbauan kepada Bapak/Ibu guru tersebut dengan membenarkan lagi soal yang telah dibuatnya sebelum diujikan kepada peserta didik” (Wawancara 14 Juni 2024).

Tim Pengembang Kurikulum di sini juga berperan dalam mengevaluasi Bapak/Ibu guru mata pelajaran bidang studi yang salah dalam pembuatan soal atau kurang memenuhi standar seperti AKM. Selain itu, Tim Pengembang Kurikulum juga menyarankan kepada Bapak/Ibu guru mata pelajaran dalam membuat soal itu tetap mengacu pada soal AKM, mulai dari ulangan harian atau sumatif tengah semester dan lain-lainnya. Dalam melaksanakan kebijakan penilaian berbasis literasi fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak/Ibu guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila mulai dari Komputer sekolah yang dapat digunakan oleh Bapak/Ibu guru mata pelajaran dalam membuat soal-soal berbasis AKM, WiFi sekolah, hal ini dapat dimanfaatkan untuk mencari bentuk-bentuk soal dari internet atau mencari bahan-bahan literasi yang digunakan dalam soal untuk peserta didik dan adanya pedoman buku dari Kemendikbud mengenai AKM dan Literasi.

Disposisi

Sikap atau disposisi adalah indikator ketiga. Ini ada hubungannya dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pelaksana, seperti dedikasi, integritas, dan demokrasi. Kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan cara yang diinginkan oleh pembuat kebijakan jika pelaksana memiliki sikap positif. Dalam melaksanakan kebijakan penilaian berbasis literasi, mata pelajaran Pendidikan Pancasila menerapkan hal tersebut dengan berbasis literasi membaca. Ibu Amirotul Mu'minah, S.Pd sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila menyatakan sebagai berikut.

“Kalau saya sendiri itu menerapkan berbasis literasinya ke dalam soal kebanyakan teks, kemudian bacaan seperti artikel-artikel gitu mbak. Kalau berupa gambar pernah juga tapi jarang mbak, kebanyakan teks dan bacaan. Jadi istilahnya kalau yang mengarah pada AKM itu mata pelajaran Pendidikan Pancasila

menerapkannya dengan berbasis literasi membaca kepada peserta didik” (Wawancara 21 Juni 2024).

Bapak Elik Triyono, S.Pd sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan penyusun soal berbasis literasi membaca juga membenarkan hal yang sama bahwasannya bahan stimulus soal berupa teks atau bacaan untuk diujikan kepada peserta didik.

“Iya mbak jadi kalau soal-soal yang berbasis seperti AKM itu kalau di mapel Pendidikan Pancasila ya jelas pake bacaan-bacaan yang panjang y amba atau istilahnya itu teks informasi yang bertujuan untuk memberikan semacam pengetahuan atau mengembangkan wawasan siswa terkait materi pembelajaran” (Wawancara 21 Juni 2024).

Ibu Amirotul Mu'minah, S.Pd mengembangkan soal berdasarkan konten yang kebanyakan adalah mengenai teks informasi dan teks artikel. Teks yang digunakan tersebut bisa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, kejadian terkini atau update atau juga bisa tidak hanya tentang materi pembelajaran saja. Hal tersebutlah yang menjadi konteks dalam komponen AKM yang telah diterapkan oleh Ibu Amirotul Mu'minah, S.Pd dalam melaksanakan kebijakan dari Kepala Sekolah. “Dari teks artikel atau informasi itu tadi ya mbak, mengarahkan anak-anak untuk bisa berpikir kritis, memecahkan masalah, mengamati keadaan yang ada di sekitarnya dan literasi yang penting. Yaa fokus dalam literasi itu tadi penting. Karena kalo tidak fokus ya mbak anak-anak dengan membaca itu tadi dia bingung, padahal jawabannya ada dalam teks itu tadi. Atau kalau tidak anak-anak bisa paham dari mengolah apa yang sudah dibaca tadi. Lebih bagus lagi kalau anak-anak bisa mengaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya dari apa yang sudah dibaca dari stimulus soal tadi. Itukan butuh fokus dari anak-anak ya mbak. Mangkannya itu tadi yang paling penting literasinya”(Wawancara 21 Juni 2024).

Selain Ibu Amirotul Mu'minah, S.Pd menerapkan berbasis literasi membaca pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Mardah Nikmatius Fadila, S.Pd sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila yang lain menyatakan bahwa, “Kalau dari saya mbak, saya kasih terlebih dahulu teks informasi sebagai bahan bacaan siswa. Dari teks tersebut kemudian saya mengarahkan siswa untuk menilai benar atau salah pernyataan yang saya berikan ke siswa berdasarkan teks informasi yang sudah dibaca oleh siswa. Jadi secara tidak langsung itu kan siswa harus jeli mbak untuk menemukan kata kuncinya di teks ya mbak dan siswa butuh pemahaman dari dirinya tentang maksud dari teks informasi apa supaya memudahkan siswa menjawab soal yang berbasis seperti AKM tadi” (Wawancara 21 Juni 2024)

Berdasarkan keterangan dari Ibu Amirotul Mu'minah, S.Pd, Ibu Mardah Nikmatius Fadila, S.Pd dan

Bapak Elik Triyono, S.Pd sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo telah menerapkan soal-soal yang mengarah pada AKM dengan menerapkan bentuk soalnya mulai dari pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan dan uraian. Kemudian dari workshop yang dilakukan juga mengenalkan kepada Bapak/Ibu guru karakteristik dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah dengan mengembangkan soal dari tiga aspek yang harus berkesinambungan, yaitu aspek karakteristik (konten), keluasan (proses kognitif), dan kedalaman (konteks) materi pembelajaran. Berikut ini dapat dilihat pada tabel indikator rangkuman disposisi dari guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo mengenai cara yang dilakukan dalam mengembangkan soal berbasis literasi membaca berdasarkan hasil dari wawancara mendalam dan dokumentasi:

Tabel 1 Rangkuman Hasil Disposisi

Komponen AKM	Bentuk Penerapan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila	Cara yang dilakukan
Konten	Teks informasi atau teks artikel sebagai bahan literatur peserta didik.	Mencari bahan literatur dari internet/materi pembelajaran peserta didik sebagai teks informasi yang diberikan.
Proses Kognitif	Mengakses dan mencari informasi dalam teks.	Memberi kalimat pernyataan kepada siswa apakah benar atau salah berdasarkan teks informasi yang diberikan.
	Mengolah apa yang sudah dibaca sehingga timbul pemahaman dalam dirinya.	Mengarahkan peserta didik untuk membuat kesimpulan yang tepat sesuai dengan teks informasi yang diberikan.
	Mengaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya dari apa yang sudah dibaca dari stimulus soal	Memberi pertanyaan kepada peserta didik dan dikaitkan dengan teks informasi yang diberikan untuk mencari kebenarannya atau

		pengetahuan yang telah dimilikinya.
Konteks	Sosial Budaya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, kejadian terkini atau update atau juga bisa hanya tentang materi pembelajaran saja	Menyusun soal mulai dari C3 dan C4 untuk kedalaman materi yang berikan.

Sumber data: hasil olahan wawancara dengan informan

Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan ada pada kategori terakhir yaitu birokrasi. Kebijakan yang rumit menghendaki keterlibatan dari banyak orang. Dalam perannya sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus dapat berkoordinasi secara efektif untuk mendukung kebijakan yang disetujui secara politik. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dalam bentuk wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam hasil penelitian, implementasi kebijakan dilakukan dengan rangkaian koordinasi antara lain (1) Kepala Sekolah sebagai pembuat Kebijakan Penilaian Berbasis literasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan SK dan Memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh Bapak/Ibu guru mata pelajaran dalam SK; (2) Wakil bagian Kurikulum sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan dan berkoordinasi dengan tim pengembang kurikulum untuk melakukan sosialisasi kepada Bapak/Ibu guru; (3) Tim Pengembang Kurikulum melakukan sosialisasi dalam bentuk menyediakan *workshop*/pelatihan kepada Bapak/Ibu guru mata pelajaran, memberikan pengarahan kepada Bapak/Ibu guru dengan memberi contoh-contoh soal yang mengarah pada AKM dan menjadi korektor soal yang dibuat oleh Bapak/Ibu guru mata pelajaran ; (4) Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila yang melaksanakan kebijakan dari kepala sekolah (implementor) dan membuat soal-soal berbasis literasi membaca dengan menerapkan dari 3 aspek komponen AKM yaitu konten, proses kognitif dan konteks.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi kebijakan penilaian berbasis literasi membaca pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo berjalan dengan baik dan berhasil. Dikatakan demikian sebab implementasi dilakukan dengan alur komunikasi oleh Kepala Sekolah sebagai pembuat kebijakan dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepada semua

Bapak/Ibu guru mata pelajaran untuk memasukkan soal-soal Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dalam penilaian sumatif di SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo. Kemudian Kepala Sekolah menunjuk Wakilnya yaitu Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum sebagai penanggung jawab koordinator pelaksanaan kebijakan penilaian berbasis literasi tersebut. Setelah itu, Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum kemudian bekerjasama dengan Tim Pengembang Kurikulum SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo sebagai sumber daya dalam melakukan sosialisasi kepada Bapak/Ibu guru mata pelajaran bidang studi. Disposisi dari Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila sendiri telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan kebijakan dengan mengembangkan soal dari tiga aspek yaitu konten, proses kognitif dan konteks. Konten yang diterapkan berupa teks informasi/teks artikel sebagai stimulus, dari teks tersebut kemudian mengarahkan peserta didik untuk dapat menemukan informasi dalam teks, mengolah apa yang sudah dibaca dan mengaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Sementara konteks yang diberikan dapat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, kejadian terkini atau terupdate atau hanya mengenai materi pembelajaran saja.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diambil oleh peneliti guna membangun yaitu sekolah hendaknya meningkatkan pengawasan kepada Bapak/Ibu guru mata pelajaran dalam menerapkan penilaian berbasis literasi dalam pembelajaran bukan hanya pada saat sumatif saja dan dalam memberi konten yang diterapkan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dapat berupa gambar, tabel atau data mengenai studi kasus untuk menambah wawasan pengetahuan peserta didik tidak berupa teks informasi/artikel saja.

Ucapan Terima Kasih

Dengan tulus mengucapkan terimakasih kepada Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo yang telah memberi kemudahan dan kelancaran dalam penelitian ini. Tidak lupa juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala Sekolah SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo, Koordinator Tim Pengembang Kurikulum dan Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo yang telah menjadi informan dalam penelitian ini. Serta seluruh pihak dari SMA Wachid Hasyim 2 Taman Sidoarjo yang dengan senang hati dan berkontribusi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, H., Zaqiah, Q. Y., & Supiana, A. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128–135. <http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/>
- Deviana, T., & Aini, D. F. N. (2022). Learning Progression Guru Sekolah Dasar dalam Pengembangan Konten Soal Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). *Jurnal Basicedu*, 6(1), 1285–1296. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2095>
- Fajriyanti, L. (2023). Tantangan Guru dalam Mengembangkan Nalar Kritis Siswa untuk Menjawab Soal-Soal Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 4(1), 52–63.
- Familiyana, L., Hardjono, H. S., & Suryani, I. (2022). Persepsi Guru terhadap Soal Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi Membaca di SMP. *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, Dan Asing*, 5(1), 74–85. <https://doi.org/10.31540/silamparibisa.v5i1.1697>
- Fauziah, A., Sobari, E. F. D., & Robandi, B. (2021). Analisis Pemahaman Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mengenai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 1550–1558. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/608>
- Fayza, A. A., Nugraha, D. M., & . S. (2021). Pengaruh Literasi Terhadap Perkembangan Pembelajaran Pkn. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 6(1), 57–65. <https://doi.org/10.15294/harmony.v6i1.46506>
- Hutabarat, H., Elindra, R., & Harahap, M. S. (2022). Analisis Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sma Negeri Se Kota Padangsidempuan. *Jurnal MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5(3), 58–69. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/>
- Komang Wahyu Wiguna, I., & Adi Nugraha Tristaningrat, M. (2022). Langkah Mempercepat Perkembangan Kurikulum Merdeka Belajar. *Edukasi : Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(1), 20. <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/edukasi>
- Marni Hartati, N. (2021). *Instrumen Penilaian Literasi Membaca*.
- Mukhlisoh, N., & Bakar, M. Y. A. (2021). Ujian Nasional: Harapan dan tantangan. *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 9(2), 59–65. <https://doi.org/10.30738/wd.v9i2.11978>
- Novita, N., Mellyzar, M., & Herizal, H. (2021). Asesmen Nasional (AN): Pengetahuan dan Persepsi Calon Guru. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1568>
- Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud. (2020). AKM dan Implikasinya pada Pembelajaran. *Pusat Asesmen Dan Pembelajaran Badan Penelitian Dan*

Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Pembelajaran Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 1–37.

Putri, R., Lestari, S., & Pratiwi, C. P. (2022). Implementasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) pada siswa kelas V Sekolah Dasar. *Prosiding Konferensi Ilmiah Dasar*, 3, 785–791.

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/KID/article/view/2972>
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/KID/article/download/2972/2333>

Ramdhayani, E. (2023). Pentingnya Literasi Dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Karakter Di Era Digital. *Journal of Engineering Research*, 7(2), 67–73.

Rokhim, D. A., Rahayu, B. N., Alfiah, L. N., Peni, R., Wahyudi, B., Wahyudi, A., Sutomo, S., & Widarti, H. R. (2021). Analisis Kesiapan Peserta Didik Dan Guru Pada Asesmen Nasional (Asesmen Kompetensi Minimum, Survey Karakter, Dan Survey Lingkungan Belajar. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 4(1), 61. <https://doi.org/10.17977/um027v4i12021p61>

Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). Implementasi Kebijakan Publik "Transformasi Pikiran George Edwards" (S Hadi Saputro, Ed.; Cetakan I). Lukman Offset.

Taufik, A., Riyadi, M., & Nurhayati, N. (2023). Pengembangan Soal Asesmen Kompetensi Minimum Berbasis Literasi Numerasi. *Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 115–124. <https://doi.org/10.53299/bajpm.v3i2.254>

Vijayantera, I. W. A. (2020). Tinjauan Literasi Budaya dan Kewargaan Siswa SMA Se-Kota Banda Aceh. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 22–28.

Wijaya, A., & Dewayani, S. (2021). Framework Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). *Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1–108.